

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN (PPPMP) DI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Dadang Mashur

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Realita yang terungkap seputar berhasil atau kurang berhasilnya penerapan kebijakan pembangunan pemerintah tersebut memperkuat indikasi bahwa memposisikan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Pada akhirnya, peran aktif masyarakat tersebut dapat terwujud melalui suatu pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat. Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai issue sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah pedesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Pendekatan pemberdayaan saat ini merupakan cara yang paling populer untuk memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program atau proyek yang sifatnya top down, tidak tepat sasaran. Selain itu terkesan hanya melaksanakan program atau proyek dan keberlanjutan program atau proyek kurang mendapat perhatian sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Seiring perubahan paradigma pembangunan, peranan individu bukan lagi sebagai objek, akan tetapi juga sebagai subjek, maksudnya mereka menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber yang mengarahkan pada proses pertumbuhan hidup mereka. Artinya masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan program dan pelaksanaan program pembangunan.

Kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di Indonesia. Komitmen negara Indonesia terhadap pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan sudah diakui dan dimulai sejak awal

pemerintahan Indonesia merdeka. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan terpenting negara yang harus dipenuhi sekaligus sebagai tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang memiliki ciri multidimensional akan memerlukan banyak tangan dan akan membutuhkan banyak pihak yang memiliki kemampuan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pola pembangunan yang bersifat sentralisasi dan *top down* yang diterapkan pada waktu-waktu sebelumnya, lebih menggambarkan peran yang dominan dari pemerintah. Jadi, menyangkut masalah pendanaan maupun pengelolaan atau pelaksanaannya, sering kali masyarakat hanya menjadi “penonton”. Dengan adanya perubahan pada pola desentralisasi, setidaknya peran pemerintah dalam pembangunan lebih dibatasi pada pembiayaan saja. Sementara itu yang menjadi pengelola atau pelaksanaannya diupayakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alam Riau khususnya Kabupaten Bengkalis, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau termasuk Kabupaten Bengkalis bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan kemiskinan struktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, pembangunan dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis.

Adanya Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Pedesaan (PPPMP) didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk menjaga perubahan lingkungan dikarenakan adanya perkembangan atau kemajuan zaman yang akan berdampak negatif pada partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Pedesaan merupakan program strategis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat karena program ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berswadaya dan kemandirian terutama bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha ekonomi dan pembangunan secara optimal. Melalui Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Pedesaan

diharapkan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat miskin yang didukung dengan pengembangan sumber daya manusia, sumber modal maupun bantuan teknis lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis No.52 Tahun 2011 menimbang bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan Program Pemberdayaan Desa yang menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Rupert Utara adalah kawasan terluar dari Kabupaten Bengkalis bahkan secara geografis Rupert Utara adalah kawasan perbatasan wilayah NKRI dengan Selat Malaka Negara Malaysia. Tingkat perekonomian di wilayah Kecamatan Rupert Utara ini tergolong rendah dan dilatarbelakangi juga dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jenis mata pencaharian masyarakat desa tidak terlalu bervariasi, hanya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Selain jumlah penduduknya yang sedikit juga di bebani oleh jumlah fakir miskin dan masyarakat miskin yang cukup banyak. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah:

Selanjutnya, berdasarkan data-data masyarakat miskin dan fakir miskin yang diperoleh kantor Kecamatan Rupert Utara pada tahun 2012 telah terjadi pengurangan tingkat kemiskinan. Disinilah peran Program Pemberdayaan Desa (PPD) sebagai formulasi pengentasan tingkat kemiskinan di pedesaan. Jumlah masyarakat miskin dan fakir miskin yang berada pada saat ini menjadi prioritas sasaran utama program sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat-masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Adapun jumlah masyarakat ekonomi menengah kebawah yang menjadi pemanfaat program yaitu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah fakir miskin, masyarakat miskin dan jumlah pemanfaat Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kegiatan UED-SP.

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Fakir Miskin	Jumlah Miskin	Jumlah Pemanfaat Program
1	Tanjung Medang	2442 jiwa	73 orang	97 orang	162 orang
2	Teluk Rhu	2272 jiwa	69 orang	114 orang	120 orang
3	Titi Akar	5216 jiwa	-	2.018 orang	103 orang
4	Tanjung Punak	812 jiwa	31 orang	74 orang	109 orang
5	Kadur	2832 jiwa	-	265 orang	141 orang
Jumlah		13.574 jiwa	173 orang	2.568 orang	635 orang

Sumber: Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2014

Berdasarkan keterangan tabel 1.2 diatas, jumlah masyarakat ekonomi menengah kebawah jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pemanfaatan program ini. Dengan demikian bagaimana pelaksana/pelaku program didalam mengimplementasikan program dan bagaimana keterlibatan dan peran masyarakat desa Kecamatan Rupert Utara dalam menerima program-program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun ini.

Fenomena yang telah diuraikan sebelumnya mendorong minat peneliti untuk lebih mendalami masalah penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain, seberapa jauh upaya, prinsip, dan tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terealisasi sehubungan dengan pelaksanaan bantuan dana sebesar 1 Miliar untuk PPD yang dikelola oleh lembaga UED-SP terhadap masyarakat lokal, peneliti mencoba mendeskripsikan setelah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPM-PD) mengupayakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan mengalokasikan dana sebesar 1 Miliar untuk Dana Usaha Desa (DUD) dan 1 Miliar dana Instruksi Bupati (INBUP) untuk Infrastruktur Pedesaan di setiap desa. Dana tersebut dialokasikan ke sumber modal Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan Penguatan Infrastruktur Pedesaan di setiap desa. Hal ini dilakukan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menuntaskan kemiskinan. Kebijakan pemerintah kabupaten tersebut merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Alokasi dana yang disalurkan langsung ke pemerintahan desa tersebut dikelola langsung oleh desa setempat. Dengan adanya Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) tersebut pemerintah berharap dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan makmur. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat mampu berdikari sehingga tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat diatasi. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat desa juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang baik dibidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, sosial budaya dan politik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, akhirnya penelitian ini memiliki asumsi bahwa penanggulangan kemiskinan dapat diatasi dengan mengimplementasikan program secara optimal sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) didalam Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) dalam rangka kemandirian masyarakat setempat.

KONSEP TEORITIS

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Salah satu tugas negara yang memerlukan tindakan kebijakan adalah menciptakan kesejahteraan dari seluruh lapisan warganya dengan jelas memberikan pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati oleh aparatur kepada masyarakat. Nilai sebenarnya layanan sepenuh hati terletak pada kesungguhan empat sikap : *Passionalite* (gairah), *progressive* (progresif), *proactive* (proaktif), dan *positive* (positif). Keempat unsur pelayanan ini dapat melahirkan dayaguna dan hasilguna jika implementasinya berjalan dalam ikatan yang terpadu.

Schneider, sebagai salah satu representasi para ahli tersebut, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) (Erwan, 2012:19).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mencapai tujuan yang baik, sebagaimana menurut William Dunn maka proses kebijakan yang dibuat harus memperhatikan tahapan-tahapan yaitu Tahap penyusunan Agenda; Tahap Formulasi Kebijakan; Tahap Adopsi Kebijakan; Tahap Implementasi Kebijakan; Tahap Penilaian Kebijakan.
2. Bahwa dalam perumusan kebijakan, seharusnya para aktor pembuat kebijakan memperhatikan variabel-variabel lingkungan seperti : ekonomi, sosial, politik.
3. Kebijakan yang dilahirkan harus merupakan kebijakan pro Rakyat, yang dibuat berdasarkan keinginan-keinginan sebagian besar masyarakat.
4. Kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan publik (*public mission*) bukan berdasarkan keinginan elit.
5. Menempatkan secara proporsional fungsi-fungsi aparatur pemerintah sebagaimana mestinya, bahwa aparatur merupakan pelaksana kebijakan.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno, 2007:146).

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Winarno, 2007:146). Sedangkan definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi yang diberikan Friedrich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (Winarno, 2007:146). Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Konsep kebijakan publik menurut Anderson mempunyai beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Pada masa lalu banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini berkenaan dengan konflik pertanahan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, kerusakan lingkungan, alokasi anggaran, dan subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, pengangkatan dalam jabatan struktural, perubahan batas administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa, pemilihan kepala daerah serta masalah penanggulangan kemiskinan.

Ripley dan Franklin mengemukakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata. (Winarno, 2007:145).

Ripley dan Franklin menegaskan :

Implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua perspektif saja. *Pertama*, keberhasilan diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas. *Kedua*, keberhasilan implementasi dicirikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu berjalan sesuai dengan pola-pola yang telah ditetapkan (Sujianto, 2008:33).

Faktor-faktor keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin adalah:

1. Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat konsensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut.
2. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
3. Tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi (Sujianto, 2008:47)

Apabila kelompok-kelompok penting dari mereka (kelompok sasaran) mempunyai tingkat konsensus yang tinggi untuk menentang implementasi, maka tidak mungkin implementasi dapat berhasil. Namun bila kelompok-kelompok penting tersebut berada pada satu pandangan dalam implementasi maka implementasi akan dibuat lebih mudah (Sujianto, 2008:33).

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edwards III (Dwiyanto, 2009:31-32), menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat variabel tersebut adalah, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas

maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang di temui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah di gariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah di tetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang di cantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

b. Konsep Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri, dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, “bangun” berarti membuat, mendirikan, atau membina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan

meliputi bentuk (anatomis), kehidupan (fisiologis), dan perilaku (*behavioral*). Lebih dari itu, kata “pembangunan” telah menjadi bahasa dunia. Keinginan bangsa-bangsa untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing melahirkan berbagai konsep pembangunan. Antara lain, pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaruan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan dan pembinaan (Ndraha, 1990).

Menurut Siagian (1974), pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Surjono, 2007:2) Ponsioen (1968), berpendapat bahwa pembangunan bangsa adalah bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan setiap negara berkembang bersifat multidimensional, yakni pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, banyak ahli seperti Siagian, Ponsioen, dan Hans menyimpulkan bahwa pembangunan meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial. Bryant dan White (1982), menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama.

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, baik individu maupun kelompok (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan dalam memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa pembangunan yang berwawasan *people centered* (berpusat pada rakyat), berarti proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya. Sementara Korten (1984) menjelaskan bahwa asumsi dasar pembangunan yang berpusat pada rakyat itu menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar tetapi juga pada potensi manusia. Alasannya, karena menurut

Chambers (1987) setiap manusia memiliki potensi dan daya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik.

1. Model Pertumbuhan

Dengan dasar itu sebagian dari konsep pembangunan tersebut dirinci lebih jauh bahwa pertumbuhan merupakan konsep ilmu ekonomi. Menurut Thirlwall (1974), pertumbuhan dinilai sebagai kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka waktu tertentu.

Akan tetapi, konsep-konsep pembangunan yang hanya berfokus pada ekonomi itu sempat dipermasalahkan. Menurut Ponsioen (1968), pertumbuhan ekonomi tanpa dukungan perubahan sosial dapat membawa dampak negatif terhadap bidang sosial seperti pengangguran, dehumanisasi (Surjono, 2007:5). Briant dan White (1982) juga berpendapat senada dengan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kemampuan jika tidak diikuti kemampuan dan ketahanan sosial, ibarat bayi yang subur dan bobotnya meningkat cepat tetapi tetap bayi.

2. Model Modernisasi

Modernisasi merupakan istilah yang kini semakin populer, Bendix (dalam Beling, 1970), modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris (1760-1830) dan revolusi politik di Prancis (1787-1794). Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi itu berupa perubahan teknik industri dari cara tradisional ke modern yang berasal dari hasil penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Schoorl (1980) memberi batasan modernisasi sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aspek masyarakat.

Modernisasi terkait dengan perubahan sosial, disatu pihak perubahan sikap masyarakat diperlukan sebagai prasyarat bagi kelancaran proses modernisasi dan dilain pihak perubahan sosial merupakan produk proses modernisasi. Padahal sebenarnya modernisasi dimaksudkan sebagai usaha mencapai taraf yang sama dengan yang ada di Barat, bukan meniru semua yang berasal dari Barat karena hal itulah yang dimaksud dengan westernisasi. Dengan jelas, Riggs (dalam Beling, 1980) menyebutkan bahwa modernisasi merupakan usaha menandingi Barat. Konsep ini sekaligus membantah bila modernisasi sama dengan westernisasi atau menjadikannya sama seperti di Barat (Surjono, 2007:6).

3. Model Perubahan Sosial

Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan lembaga-lembaga (*institutions*) masyarakat didalam suatu masyarakat, yaitu perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk sikap dan perilaku kelompok. Sementara itu, faktor pendorong perubahan sosial meliputi biologis, teknologis dan ideologis (Soemardjan, 1962).

Sementara Kingsley (1960) menyebut perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dia mencontohkan timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalisme menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan yang menyebabkan perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Menurut Gillin and Gillin (1954), perubahan sosial adalah suatu variasi cara hidup yang telah diterima disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Koenig (1957) mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-nodifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia karena faktor intern maupun ekstern. Esman (dalam Thomas, 1972) berpendapat ada lima bentuk perubahan sosial.

1. Perubahan evolusioner, yakni perubahan yang tidak dapat dikendalikan dengan lingkungan permisif.
2. Perubahan revolusioner, yaitu perubahan yang dapat dikendalikan atau bisa tidak tetapi dengan lingkungan yang dimanipulasi.
3. Perubahan dialektikal, yaitu perubahan yang tidak dikendalikan dan lingkungan permisif.
4. Perubahan yang dipaksakan, yaitu perubahan yang dikendalikan dengan memanipulasi lingkungan.
5. Perubahan terkendali, yaitu perubahan yang dikendalikan tetapi lingkungan yang permisif.

4. Model Pembaruan

Pembaruan merupakan salah satu bentuk proses sosial, erat berkaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial. Pembaruan dan modernisasi didorong penemuan ilmiah (*innovations*), sedangkan terhadap perubahan sosial, pembaruan mempunyai pengaruh timbal-balik. Menurut Rogers (1971), agen pembaru (*agent of change*) disebut juga inovator (*innovator*), yakni tokoh profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi orang lain sesuai dengan yang diinginkan lembaga yang diwakilinya. Sementara inovator mempunyai ciri khas, seperti nonkonformis, semangat tinggi, dan berpendirian teguh. Istilah inovasi menurut Cooper (1980) biasa digunakan untuk menunjukkan penciptaan teknik unggul produksi dan penerapan teknologi yang berasal dari luar negeri. Akan tetapi, pengertian inovasi sosial lebih luas yang menurut La Piere (1965) sebagai gagasan untuk mencapai tujuan sosial tertentu dengan cara baru. Bahkan di Indonesia dan negara berkembang lain, konsep inovasi meluas kebidang ideologi, terbukti dengan adanya sebutan Orde Baru (Ndraha, 1990).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Adapun narasumber adalah Kasi PMD Kecamatan Rupa Utara, Badan Pengawas, Kepala Desa, Koordinator Pendamping Desa, Perangkat Desa, Kelompok Pengelola dan Kelompok Pemanfaat. Sebagai informan kunci adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkalis.

Mengacu pada pernyataan diatas maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD), tolak ukur keberhasilan atau efektif, cukup efektif dan kurang efektif nya suatu program/kebijakan dapat dilihat melalui beberapa indikator. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edwards III, menunjuk empat indikator yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat indikator tersebut adalah, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Tujuan utama dari komunikasi adalah mempengaruhi orang lain dengan segala macam cara agar dapat dimengerti dan diterima. Salah satu penghambat PPD adalah transmisi komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi dari pelaksana program kepada kelompok sasaran. Transmisi, konsistensi dan kejelasan dari komunikasi tidak dapat dipisahkan, ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.

Transmisi komunikasi yang dilakukan pelaksana program dikarenakan adanya kejelasan dan konsistensi dari penjelasan petunjuk teknis operasional yang diberikan kepada pelaksana program yang selanjutnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Begitu juga dengan kejelasan penyampaian dikarenakan pelaksana program memahami dan mengerti serta konsisten dalam menyampaikan aturan-aturan, prinsip-prinsip serta kriteria-kriteria PPD. Konsistensi penyampaian juga dikarenakan informasi yang diperoleh pelaksana program dapat dipahami dan dimengerti sehingga penyampaian komunikasi kepada kelompok sasaran menjadi jelas dan tidak berubah-ubah.

Penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah *pertama*, komunikasi yang kurang konsisten dilakukan oleh pelaksana program kepada masyarakat. Pelaksana program seharusnya lebih konsisten dalam menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran dan kejelasan penyampaian dari tujuan akhir PPD yang hampir tidak diketahui oleh kelompok sasaran, yang diketahuinya hanyalah PPD dalam kegiatan UED-SP ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha. Tujuan akhir dari PPD yaitu untuk mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat dan meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat pedesaan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pemanfaat.

b. Sumber Daya

Sumber daya sangat mempengaruhi keberhasilan PPD adalah staf/pengelola yang secara kuantitas masih sedikit kurang untuk melaksanakan kegiatan seperti UED-SP. Jumlah pengelola yang ada sekarang ini memang dapat bekerja secara baik tetapi kurang efektif dikarenakan staf/pengelola yang dimiliki berasal dari tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah memiliki pekerjaan dan kesibukan sehingga dapat kita bayangkan pembinaan dan pengelolaan yang mereka lakukan berjalan kurang efektif.

Staf/pengelola merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Untuk itu staf/pengelola diharapkan memiliki keahlian-keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah staf tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Termasuk pada kasus pembinaan dan pengelolaan UED-SP di beberapa Desa di Kecamatan Rupert Utara yang sedikit lamban dan cenderung tidak efisien. Penyebabnya terletak pada kurangnya waktu dan rendahnya motivasi pelaksana program, dan jumlah staf yang menangani pelaksanaan UED-SP termasuk kurang, tidak sesuai dengan jumlah pemanfaat dan kelompok sasaran yang banyak.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana program akan keberhasilan kegiatan PPD apakah menerima atau menolak. Dukungan merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana program dan masyarakat. Di Kecamatan Rupert Utara, dukungan dari aparat pemerintah dan masyarakat sangat baik sekali dan dapat menerima program dengan sukacita. Responsivitas dari pelaksana kebijakan akan program ini mendapat apresiasi dari kelompok sasaran/masyarakat. Sikap ingin membantu masyarakat miskin tampak sekali dari kemudahan-kemudahan yang diberikan dan pengelolaan kegiatan yang memihak kepada masyarakat miskin.

Semangat dari pengelola/pelaksana kegiatan semakin lama semakin bertambah dikarenakan insentif yang mereka peroleh semakin besar berdasarkan persentasi pembagian jasa yang di pengaruhi oleh tingkat pengembalian. Insentif pengurus diambil dari Bunga UED-SP 11% Tahunan, dan total dari bunga tersebut di ambil lagi sebesar 60% untuk insentif pengurus di bagi perbulannya. Selanjutnya untuk pembagian pengelola, pengawas, KPM dan otoritas dari insentif pengurus sebesar 60% itu persentasinya bervariasi berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah didalam lembaga UED-SP tiap Desa yang di atur didalam AD-ART lembaga UED-SP.

Pada saat sekarang ini insentif para pengelola sudah berada rata-rata di atas 1 juta rupiah, di tambah juga dengan insentif dari pemerintah kabupaten melalui BPM-PD sebesar Rp. 150.000,- perbulannya. Jadi, keberhasilan sikap pelaksana kegiatan dalam mengelola kelembagaan UED-SP dikarenakan insentif yang didapat cukup besar.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Struktur birokrasi/organisasi dari pelaksana PPD di Kecamatan Rupa Utara sangat sederhana sekali, keanggotaannya juga terbatas. Hal tersebut telah diatur dalam petunjuk teknis operasional PPD yang menjadi ukuran dasar dari prosedur kerja (SOP) yaitu salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi dalam menjalankan Program Pemberdayaan Desa.

Petunjuk teknis operasional PPD cukup jelas, dan cukup mudah untuk dipahami, dan dalam pelaksanaannya masyarakat dan pengelola kegiatan tetap mengacu pada juknis dalam memperhitungkan kondisi lingkungan saat pelaksanaan kegiatan.

SOP dan kebijakan-kebijakan lainnya dari pengelola kegiatan sudah baik, karena pengelola dapat mengerti dan memahami secara berangsur-angsur isi dan tujuan dari juknis tersebut. Apalagi Pengelola UED-SP tidak bingung lagi dengan isi juknis yang disampaikan oleh Pendamping Desa. Hal ini disebabkan karena pada sebelumnya mereka juga pernah mengelola Program Pemberdayaan Desa dari Propinsi yang Juknisnya juga tidak jauh beda.

Upaya ini merupakan revitalisasi dari program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi riau terbukti telah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat miskin yang meliputi:

1. Pengurangan beban dan peningkatan pendapatan;
2. menggerakkan usaha sektor riil di pedesaan;
3. mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga ekonomi mikro (UED-SP) yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan dengan suku bunga yang rendah;
4. terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan; dan
5. terjadinya proses pembinaan bagi masyarakat.

Dengan demikian, Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan merupakan mediasi pemerintah kabupaten terhadap pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian desanya masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten mengharapkan masyarakat desa yang selama ini berpenghasilan rendah dapat meningkat.

Prinsip pengelolaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui:

1. Prinsip dasar

Prinsip dasar Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan secara transparan, dikelola oleh masyarakat, dan memperhatikan masyarakat miskin.

2. Swadaya

Masyarakat memberikan swadaya pada kegiatan usulan sebagai indikator adanya kesanggupan dan kebutuhan.

3. Pelestarian

Kegiatan ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan masyarakat pada tingkat makmur (sejahtera).

Adapun didalam Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan terbagi atas dua bidang program yaitu Program Pemberdayaan Desa (PPD) untuk bidang ekonomi dan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) untuk bidang pembangunan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Pedesaan ini adalah :melalui alokasi dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dikelola oleh lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebesar 1 Miliar dan untuk Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) sebesar 1 Miliar Pertahun dengan Total 2 Miliar pertahun tiap desa bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara produktif dan pembangunan infrastruktur masyarakat Desa. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha dalam rangka mengurangi pengangguran.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelolaan pembangunan desa.
4. Mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan perdesaan
5. Meningkatkan pelestarian lingkungan melalui swadaya pembangunan masyarakat
6. Meningkatkan kreativitas berwirausaha.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur/ sarana prasarana pedesaan.
8. Mendorong tumbuhnya usaha sektor informal

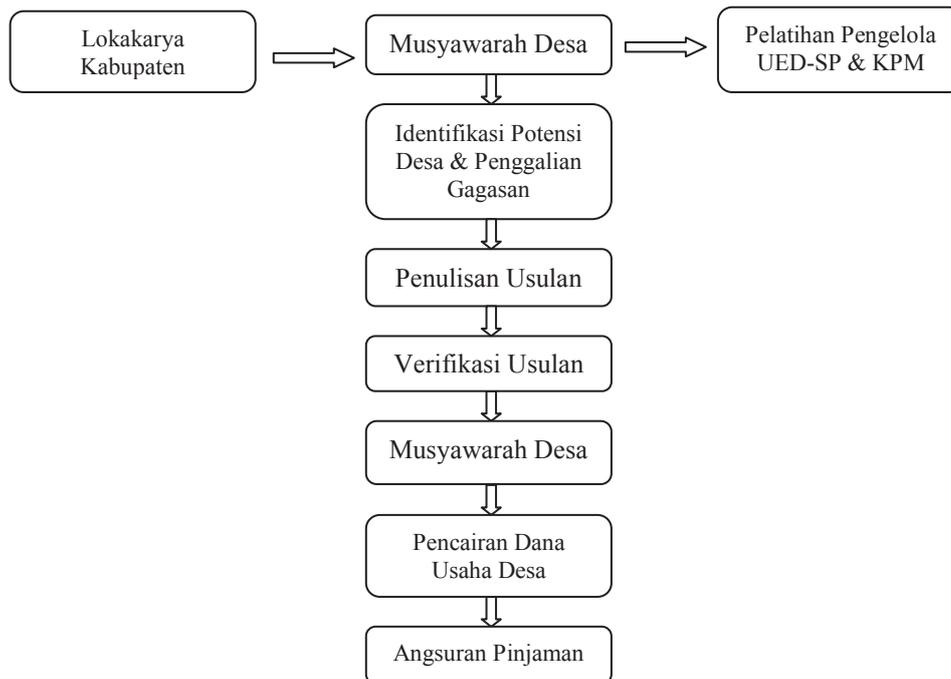
Adapun mekanisme pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) di bidang ekonomi dan pembangunan (PPD dan PPIP) yaitu :

Mekanisme Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang meliputi pendataan calon pemanfaat,

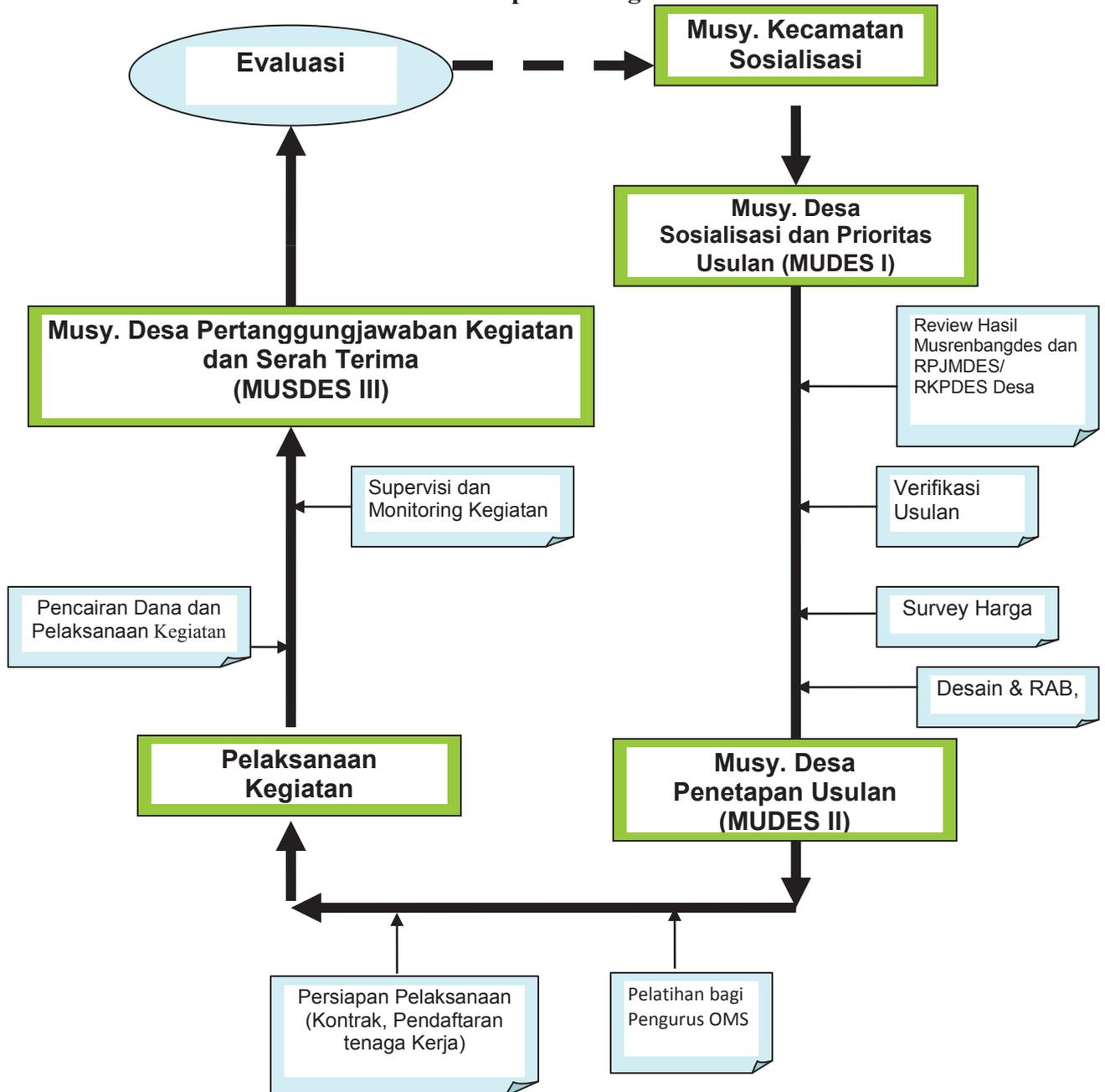
penetapan calon pemanfaat, penggunaan dana, dan pengembalian dana pinjaman yaitu:

- a. Pelaksanaan Pendataan Calon Pemanfaat: dilaksanakan langsung dengan cara sosialisasi program UED-SP oleh Pendamping Desa dengan unsur-unsur perangkat desa kepada masyarakat desa melalui tahapan-tahapan Musyawarah Desa yang didalamnya menetapkan bahwa setiap calon pemanfaat harus mengajukan proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) dan diperiksa kelengkapan dokumen administrasi Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) oleh pengelola UED-SP yaitu Staf Analisis Kredit (SAK).
- b. Pelaksanaan penetapan calon pemanfaat: setelah seluruh pemanfaat melengkapi dokumen administrasi Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) maka dilakukan proses verifikasi survey lapangan sebagai penilaian yang meliputi (1) tempat usaha, (2) kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan dalam proposal, (3) kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha, (4) kebenaran dan nilai agunan yang diajukan, (5) kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman, dan (6) karakter calon pemanfaat. Setelah proses verifikasi enam kategori memenuhi sayarakat maka dapat ditetapkan jumlah calon pemanfaat.
- c. Pelaksanaan penggunaan dana: oleh pengelola UED-SP membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan pemegang otoritas Rekening Dana Usaha Desa (DUD) diketahui oleh Pendamping Desa dan Ketua BPD yang dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada forum musyawarah desa, pemegang otoritas rekening Dana Usaha Desa (DUD) berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) mentransfer dana dari rekening DUD ke rekening UED-SP sesuai dengan jumlah yang diajukan. Setelah dana dicairkan melalui rekening DUD maka langsung dilakukan penyaluran dana ke anggota atau kelompok pemanfaat/ masyarakat yang meminjam. Kewajiban bagi pemanfaat anggota/kelompok harus menggunakan dana pinjaman sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha, pemanfaat wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang di ajukan dan tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).
- d. Proses pengembalian dana pinjaman: dikembalikan setiap bulan oleh pemanfaat setelah satu bulan yang lalu menerima penyaluran dana pinjaman, pemanfaat mengembalikan dana pinjaman dengan bunga 12% pertahun atau 1% perbulan yang telah ditetapkan didalam Petunjuk Teknis Program, apabila terjadi keterlambatan pengembalian atau penunggakan maka pemanfaat akan dikenakan denda sesuai yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) dari hasil musyawarah desa.

Gambar 1.2 Alur Kegiatan Program Pemberdayaan Desa UED-SP



Gambar 1.3 Alur Tahapan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Kabupaten Bengkalis



Sumber: Sekretariat Koordinator dan Pendamping Desa Kecamatan Rupa Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) di bidang ekonomi melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kegiatan UED-SP yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengembangan perekonomian masyarakat dengan usaha ekonomi masyarakat di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, implementasi penanggulangan kemiskinan pengembangan perekonomian masyarakat dengan usaha ekonomi masyarakat melalui Program Pemberdayaan Desa di Kecamatan Rupat Utara secara keseluruhan menurut peneliti cukup berhasil yang didukung oleh kemampuan pelaksana kegiatan dalam mengelola dan membina masyarakat miskin melalui sumber daya yang dimiliki, sehingga inti dari PPD ini membangun karakter masyarakat mulai dari yang tidak berdaya sampai kepada memiliki usaha produktif dan bisa memperkerjakan orang telah tercapai. Hasil yang diinginkan yaitu terbentuknya berbagai usaha-usaha masyarakat yang lebih berdaya, produktif dan lebih mandiri telah terwujud. Kedua, walaupun diantara keempat faktor-faktor penilaian didalam implementasi PPD terdapat beberapa faktor penghambat adalah salah satunya komunikasi yang kurang dipahami oleh masyarakat, kurang jelas dan kurang konsistennya petugas dalam menyampaikan informasi-informasi. Sumber daya, pada aspek kuantitas petugas pelaksana yang jumlah pengelola kelembagaannya tidak sesuai/ sedikit dengan jumlah kelompok sasaran yang sangat banyak.

Didalam keempat faktor-faktor penentu keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kegiatan UED-SP yaitu dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka yang sangat dominannya adalah keberhasilannya dari faktor disposisi dan struktur birokrasinya efektif, sementara dari faktor komunikasi dan sumber daya kurang efektif, tetapi kedua faktor tersebut sudah mendekati keberhasilan dan sedikit perlu di benah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surjono, dkk, 2008, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW, Malang.
- Amin Ibrahim, 2004, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Andre Bayo Ala, 1996, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Bagong Suyanto, 1995, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- David Hunger, 2003, *Manajemen Strategis*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Fadillah Putra, 2005, *Kebijakan Tidak Untuk Publik*, Penerbit, CV. Langit Aksara, Magelang.
- Inu Kencana, dkk, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Citra Utama, Jakarta.
- Isbandi Rukminto, 2003, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Miriam Budihardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Muhammad Yunus, 2007, *Bank Kaum Miskin*, Penerbit Marjin Kiri, Jakarta.
- Mohammad Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ryaas Rasyid, 2002, *Makna Pemerintahan*, Penerbit PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sondang P. Siagian, , 2003, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sufian Hamim, 2005, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Multi Grafindo, Pekanbaru.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Suwarsono, 2000, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- William N Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wisnu Hidayat dkk, 20 03, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Wrihatnolo dan Nugroho, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Zulkarnaini, 1997, *Administrasi Pembangunan*, BPFE – UNRI, Pekanbaru